

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu asas pelaksanaan pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu adanya desentralisasi. Hal ini berarti pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka NKRI. Dengan demikian, daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk di dalamnya pelaksanaan pembangunan. Pemerintahan yang desentralistik menerapkan azas demokrasi diikuti oleh pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah. Otonomi daerah dilancarkan sejak 1 Januari 2001. Daerah-daerah otonom (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai.

Untuk itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ini juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi

dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemndirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian terbesar daerah otonom (kabupaten/kota), kemampuan pendapatan asli daerahnya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.

Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, namun diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif disamping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

APBD adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, di satu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan di lain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu anggaran. Terdapat hubungan benang merah mulai dari sumber pembiayaan penerimaan pendapatan daerah,

penyusunan APBD, alokasi anggaran sampai pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dilihat dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penerimaan pendapatan daerah dan anggaran daerah mempunyai kaitan yang erat terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah, oleh karena itu harus dikelola secara efektif, efisien dan profesional serta berkelanjutan.

Andra Eka S, Ade Fatma L, dan Idhar Yahya (2008), melakukan penelitian mengenai analisis kemampuan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap belanja daerah di kabupaten Aceh Tenggara. Hasilnya bahwa kontribusi sumbangan terhadap PAD penerimaan dari retribusi daerah secara umum melebihi penerimaan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah merupakan sektor andalan bagi Kabupaten Aceh Tenggara dalam usaha peningkatan PAD sehingga mampu membiayai belanja daerah dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Syamsuri Rahim (2008), melakukan penelitian analisis kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah di Kabupaten Maros. Hasilnya adalah PAD kabupaten Maros dari presentase yang diperoleh kemampuan PAD masih terlalu kecil hanya di bawah 10% kontribusi pembiayaannya pada belanja daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa PAD belum mampu membiayai belanja daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Syamsuri Rahim (2008) dengan beberapa perbedaan, antara lain sebagai berikut:

1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2007-2011, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode tahun 1999 dan 2000.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Pacitan, sedangkan peneliti terdahulu mengambil daerah penelitian di Kabupaten Maros dan Aceh Tenggara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PACITAN DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH ”**.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007-2011?
2. Bagaimanakah kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007-2011?
3. Bagaimanakah kemandirian daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2007-2011
4. Bagaimanakah grafik perkembangan Kabupaten Pacitan tahun 2007-2011 dilihat dari segi keuangan?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja daerah di Kabupaten Pacitan selama 5 tahun yaitu periode tahun 2007-2011.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasar perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007-2011.
- b. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai belanja daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007-2011.
- c. Untuk mengetahui kemandirian daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2007-2011.
- d. Untuk mengetahui grafik perkembangan Kabupaten Pacitan tahun 2007-2011 dilihat dari segi keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan pihak fakultas.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang diadakannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.

